

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu kasus kecurangan yang terbesar adalah kasus perusahaan yang paling disegani di Amerika Serikat tertangkap basah telah mengelembungkan laba dan aset dengan memanipulasi aturan akuntansi secara mencolok yang mengakibatkan ribuan investor dan pegawai menderita (arens, dkk:2011;429). Pada tahun 2016 lalu kasus kecurangan yang terungkap oleh KPK yaitu Kasus Korupsi di BUMN (www.tribunnews.com diunggah pada tanggal 19 februari 2017). Kasus korupsi ini terkait pengadaan pupuk yang saat itu sedang disidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Kasus teranyar adalah suap pengadaan pupuk urea berbentuk table t di PT Berdikari (Persero). Pada kasus ini Vice President sekaligus Direktur Keuangan PT Berdikari Siti Marwa. Siti ditetapkan sebagai tersangka. Marwa ditetapkan sebagai tersangka pada pertengahan Februari tahun 2016. Berdikari sendiri adalah perusahaan BUMN.

Kasus terbaru yang terkuak pada awal tahun 2017 mengenai kecurangan yang dialami oleh Direktur utama PT Garuda Indonesia 2005-2014 Emirsyah Satar dan Soetikno Soedarjo selaku *beneficial owner* dari Connaught International Pte. Ltd. Pada awalnya dokumen yang dimuat oleh media tidak mengungkap secara rinci individu-individu yang terlibat dalam kasus suap ini. Namun, beberapa hari setelah penyelesaian tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan kasus dugaan suap yang melibatkan kontrak Rolls-Royce. KPK

resmi menetapkan Direktur Utama PT Garuda Indonesia 2005-2014 Emirsyah Satar sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi pengadaan pesawat dan mesin pesawat Airbus S.A.S dan Rolls-Royce P.L.C senilai Rp. 20 miliar dan barang senilai 2 juta dolar AS yang tersebar di Singapura dan di Indonesia.

Pada kasus ini selain Emirsyah Satar, KPK juga menetapkan Soetikno Soedarjo selaku *beneficial owner* dari Connaught International Pte. Ltd. Soetikno diduga terlibat dalam pengadaan 50 pesawat Airbus pada kurun waktu 2005-2014. Pada kasus ini KPK dibantu oleh pihak Garuda Indonesia selama proses investigasi. Garuda Indonesia sangat kooperatif dan perbuatan tindak pidana korupsi ini bersifat individual. Agus Rahardjo yang meruakan ketua KPK saat ini pun meminta agar pembesar BUMN, terutama yang terkait dengan uang dana besar yang mungkin mempermudah akses dana di luar negeri supaya tidak melakukan hal-hal negatif karena besar peluang dibuktikan oleh KPK. Ia juga mengungkapkan bahwa hal tersebut dapat kita cegah dengan masing-masing perusahaan BUMN mulai menetapkan standar-standar etika yang tepat dan pengawasan internal. Dengan adanya kasus seperti ini membuktikan bahwa pengawas internal di perusahaan kurang berjalan dengan baik. (Pramisti, 2017).

Fraud (kecurangan) hingga saat ini merupakan salah satu hal yang fenomenal baik di Negara berkembang dan negara maju. Kecurangan merupakan penyimpangan dan perbuatan hukum yang dilakukan secara sengaja, untuk keuntungan pribadi/kelompok secara *fair*, secara langsung dan tidak langsung merugikan pihak lain (Theresia, Andreas & Riska, 2014). *Fraud* di Indonesia berkembang dengan sangat cepat dan meluas. Di Indonesia istilah *fraud* atau

kecurangan akuntansi lebih dikenal dengan sebutan *korupsi* yang sangat identik dengan lembaga pemerintah (Yayuk & Nur Hayati, 2014).

Association of certified Fraud Examiners (ACFE-2000) mengkategorikan kecurangan ke dalam tiga kelompok yaitu (Tuanakotta, 2007 dan Amrizal, 2004):

- a. Korupsi, korupsi menurut *ACFE*, terbagi dalam pertentangan kepentingan, pemberian illegal, dan pemerasan.
- b. Kecurangan laporan keuangan, kecurangan ini didefinisikan sebagai kecurangan yang dilakukan oleh manajemen dalam membentuk salah saji material laporan keuangan yang merugikan investor dan kreditor. Kecurangan ini dapat bersifat finansial dan non finansial.
- c. Penyalahgunaan aset, penyalahgunaan aset dapat digolongkan ke dalam kecurangan kas dan kecurangan atas persediaan dan aset lainnya, serta pengeluaran-pengeluaran biaya secara curang. (Marcellina & Sugeng, 2009).

Sejalan dengan berkembangnya perusahaan menjadi satu kesatuan yang relatif besar, maka semakin kompleks pula masalah-masalah perusahaan yang timbul. Salah satu masalah yang timbul yaitu terbatasnya kemampuan pemimpin dalam mengawasi operasional perusahaan (Dina Rizkyana. Dkk, 2015)

Menurut Arens, dkk (2008) Komite Audit merupakan sejumlah anggota dewan direksi perusahaan yang bertanggung jawab termasuk membantu auditor agar tetap independen dari manajemen. KPMG (2004) menyatakan bahwa Komite Audit berusaha untuk meningkatkan pelaksanaan tugasnya dalam mengawasi organisasi

dengan mengandalkan *Internal Audit* sebagai sumber utama dalam membantu mereka untuk memastikan kualitas *corporate governance* (Gusnardi, 2011).

Audit Internal menurut Standar Profesi Audit Internal (SPAI) tahun 2004: “Audit Internal adalah suatu aktivitas penilaian independen di dalam suatu organisasi untuk penelitian kegiatan pembukuan, financial, dan kegiatan lainnya, sebagai dasar untuk membantu pimpinan perusahaan. Pemeriksaan itu mempunyai pengendalian manajerial yang berfungsi dengan jalan mengukur dan menilai efektivitas sarana pengendalian”. Menurut Theresia dkk (2014) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Peran Audit Internal terhadap Pencegahan Kecurangan” Audit Internal merupakan suatu kontrol organisasi yang mengukur dan mengevaluasi organisasi, Informasi yang dihasilkan, ditunjuk untuk manajemen organisasi sendiri. Peran Auditor Internal harus dapat mendorong pencapaian tujuan (*goal*) perusahaan dengan tata kelola perbankan yang baik (*Good Corporate Governance/GCG*) (Riri Z dan Lili A, 2015).

Konsep *good corporate governance* (GCG) muncul karena konflik kepentingan yang terjadi antara prinsipal dan agen yang mendorong agen untuk menyajikan informasi yang tidak sebenarnya kepada prinsipal, terutama jika informasi tersebut berkaitan dengan pengukuran kinerja agen. Penyajian informasi yang tidak wajar akan berdampak pada kebenaran informasi yang dibutuhkan oleh prinsipal. Untuk itu penerapan GCG merupakan perwujudan tanggung jawab pemerintah dalam rangka peningkatan kinerja (Rusman, 2013). Budaya kerja berbasis GCG merupakan penjabaran prinsip-prinsip GCG yang diwujudkan secara konkrit dan mewarnai kegiatan operasional perusahaan (Wilson, 2010:91).

Budaya organisasi perlu dikembangkan sesuai dengan perkembangan lingkungan dan kebutuhan organisasi (Wibowo, 2013:3). Menurut Robbins (2002) budaya berfungsi sebagai pembentuk rasa dan mekanisme pengendalian yang memberikan panduan dan bentuk perilaku serta sikap karyawan. Karyawan yang baru dalam perusahaan belum langsung bisa menjalankan semua peraturan-peraturan yang ada dalam perusahaan, tetapi karyawan tersebut akan melihat kebiasaan atau budaya yang ada dalam perusahaan tersebut. Sehingga ketika budaya organisasi tersebut kuat maka penerapan sistem pengendalian internal yang ada akan lebih efektif. Budaya organisasi berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan melalui sistem pengendalian internal yang efektif dan auditor internal dapat mencegah kecurangan melalui sistem pengendalian internal tersebut (Riri dan Lili, 2015).

Menurut Arens, dkk (2008) Sistem pengendalian internal terdiri atas kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan manajemen kepastian yang layak bahwa perusahaan telah mencapai tujuan dan sasarannya. Kebijakan perusahaan inilah yang disebut dengan pengendalian dan secara kolektif disebut dengan pengendalian internal. Tuanakotta (2013) menyatakan bahwa pengendalian internal dirancang, diimplementasikan dan dipelihara TCWG, manajemen dan karyawan lain untuk menangani resiko bisnis dan kecurangan yang diketahui mengancam pencapaian tujuan entitas seperti pelaporan keuangan yang andal. Untuk itu pengendalian dimaksudkan untuk memberikan jawaban untuk menangkal suatu ancaman, sehingga manajemen menerapkan pengendalian agar upaya seluruh ancaman terkait dengan pengelolaan harta organisasi dapat dideteksi secara dini (Rusman, 2013).

Dari hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Gusnardi (2011) yang berjudul “Pengaruh Peran Komite Audit, Pengendalian Internal, Audit Internal dan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Terhadap Pencegahan Kecurangan” menyebutkan bahwa Peran Komite Audit, Pengendalian Internal, Audit Internal dan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Berpengaruh Terhadap Pencegahan Kecurangan pada BUMN terbuka di Indonesia.

Theresa Festi dkk. (2014) melakukan penelitian mengenai Pengaruh Peran Audit Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan. Menyebutkan terdapat pengaruh yang signifikan dari peran audit internal terhadap pencegahan kecurangan. Artinya korelasi antara peran audit internal dengan pencegahan kecurangan memiliki hubungan yang kuat.

Dina Rizkyana dkk. (2015) melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh Audit Internal dan Eksternal Terhadap Pencegahan *Fraud*. Menyebutkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan positif dari masing-masing audit internal dan eksternal terhadap pencegahan *fraud*. Artinya korelasi antara peran audit internal dengan pencegahan *fraud* memiliki hubungan yang kuat, begitu pula dengan audit eksternal terhadap pencegahan *fraud* memiliki hubungan yang kuat.

Riri Z dan Lili A. (2015) yang melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Budaya Organisasi dan Peran Auditor Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan Dengan Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Sebagai Variabel Intervening. Menyebutkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dari budaya organisasi dan pelaksanaan sistem pengendalian internal terhadap pencegahan kecurangan dan terdapat pengaruh yang negatif dari peran auditor internal terhadap pencegahan

kecuranga. Dan terdapat pengaruh positif dari budaya organisasi dan peran auditor internal terhadap pecegahan kecurangan melalui pelaksanaan sistme pengendalian internal.

Taufeni Taufik (2010) yang melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Internal Auditor, Eksternal Auditor dan DPRD terhadap Pencegahan Kecurangan. Menyebutkan bahwa terdapat pengaruh secara positif dari auditor internal, auditor eksternal dan DPRD bersama-sama terhadap pencegahan kecurangan.

Dari lima penelitian sebelumnya penulis mengambil contoh dua penelitian yang di lakukan oleh Gusnardi (2011) dan Riri Zelmianti dan Lili Anita (2015). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Gusnardi (2011) mengenai Pengaruh Peran Komite Audit, Pengendalian Internal, Audit Internal dan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Terhadap Pencegahan Kecurangan. Penelitian ini menunjukkan secara signifikan bahwa kmite audit, pengendalian internal, audit internal dan pelaksanaan tata kelola perusahaan (GCG) berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan. Dan penelitian yang dilakukan oleh Riri Zelmianti dan Lili Anita (2015) mengenai Pengaruh Budaya Organisasi dan Peran Auditor Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan Dengan Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Sebagai Variabel Intervening. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pern auditor internal berpengaruh signifikan negatif terhadap pencegahan *fraud* sedangkan budaya organisasi dan sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan positif terhadap pencegahan kecurangan.

Dari hasil dua penelitian terdahulu ditemukan hasil yang tidak konsisten antara peneliti yang satu dengan lainnya. Hal ini menjadi salah satu alasan yang

melatarbelakangi penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, peneliti tertarik untuk meneliti kembali apakah dengan variabel, tempat dan waktu yang berbeda, peran komite audit, pengendalian internal, audit internal, pelaksanaan *good corporate governance* dan budaya organisasi memiliki pengaruh yang sama dengan penelitian terdahulu terhadap pencegahan kecurangan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, peneliti merumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah peran komite audit secara parsial berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan pada BTN Pusat di Jakarta ?
2. Apakah pengendalian internal secara parsial berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan pada BTN Pusat di Jakarta?
3. Apakah audit internal secara parsial berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan pada BTN Pusat di Jakarta ?
4. Apakah pelaksanaan GCG secara parsial berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan pada BTN Pusat di Jakarta?
5. Apakah budaya organisasi secara parsial berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan pada BTN Pusat di Jakarta?
6. Apakah terdapat pengaruh secara simultan antara peran komite audit, pengendalian internal, audit internal, pelaksanaan GCG dan budaya organisasi terhadap pencegahan kecurangan pada BTN Pusat di Jakarta ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, pencapaian tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh peran komite audit secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pencegah kecurangan pada BTN Pusat di Jakarta.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pengendalian internal secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pencegah kecurangan pada BTN Pusat di Jakarta.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh audit internal secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pencegah kecurangan pada BTN Pusat di Jakarta.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pelaksanaan GCG secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pencegah kecurangan pada BTN Pusat di Jakarta.
5. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh budaya organisasi secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pencegah kecurangan pada BTN Pusat di Jakarta.
6. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh peran komite audit, pengendalian internal, audit internal, pelaksanaan GCG dan budaya organisasi secara simultan terhadap pencegah kecurangan pada BTN Pusat di Jakarta.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan penelitian bagi peneliti dan bagi akademis yaitu:

1. Akademis

Untuk dapat memberikan tambahan informasi dalam pengembangan teori yang penulis teliti dalam penelitian ini dan dapat memberikan kontribusi secara ilmiah mengenai teori-teori yang telah ada, mengenai ilmu Peran Komite Audit, Pengendalian Internal, Audit Internal, *Corporate Governance*, *Fraud* dan Budaya Organisasi.

2. Perusahaan

Sebagai masukan dan bahan pertimbangan yang bermanfaat bagi perusahaan mengenai permasalahan dan kelemahan yang berkaitan dengan pengaruh peran Komite Audit, Pengendalian Internal, Audit Internal, Pelaksanaan *Good Corporate Governance* dan Budaya Organisasi terhadap Pencegahan Kecurangan.